



BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. Visi Dan Misi Daerah

Sesuai dengan amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Jember Tahun 2011-2016.

Sedangkan Arah Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2011-2016, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2011-2016.

1. VISI

Perumusan Visi Kabupaten Jember mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen Kabupaten Jember, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Berdasarkan potensi permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang ada, maka Bupati menetapkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Jember sebagai Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2006 -2025 sebagai berikut:

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jember melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat”.

2. MISI

Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Jember 2011-2016 ditetapkan 5 (lima) buah Misi sebagai berikut:



-
1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan.
 2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat.
 3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
 5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Penjelasan dari masing-masing Misi Kabupaten Jember tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

Pemerintahan yang bersih dan akuntabel menggambarkan bahwa setiap unsur aparatur pemerintah menyadari setiap tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat, sehingga tertanam dalam pribadi masing-masing untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab, dengan memberikan pelayanan yang profesional, yang pada akhirnya dapat mewujudkan kepuasan pada masyarakat. Aspiratif, partisipasif dan transparan, mempunyai makna bahwa pemerintah harus peka terhadap keinginan masyarakat, dan proses penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan demokratis, diikuti pelaksanaan yang transparan/terbuka.

2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jember, titik utama perhatian kita adalah dengan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan mengutamakan pertumbuhan sektor pertanian, perikanan



dan kelautan sebagai basis ekonomi masyarakat, tanpa harus meninggalkan sektor-sektor yang lain.

Pemberdayaan masyarakat mempunyai makna bahwa antara pemerintah dan masyarakat terjadi suatu hubungan yang positif dalam arti bahwa masyarakat ikut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan, namun sekaligus sebagai subyek/pelaku pembangunan.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan teknologi modern, serta meningkatkan aksesibilitas dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dalam menyiapkan generasi penerus yang cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan, sehingga mampu menghadapi perubahan serta perkembangan kemajuan zaman.

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Tersedianya sarana dan prasarana publik baik secara kuantitas maupun kualitas yang baik, seperti prasarana jalan, jembatan, irigasi, dan lain-lainnya. Peningkatan ketersediaan infrastruktur akan dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas layanan masyarakat.

5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas di antaranya adalah terpenuhinya rasa aman, damai, dan tenang dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui penegakkan peraturan dan adanya kepastian hukum. Dengan demikian suasana kehidupan masyarakat yang saling menghargai, toleransi dan saling menjaga kerukunan diharapkan dapat terwujud.



B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Kebijakan Umum merupakan kebijakan pemerintah daerah secara umum. Pernyusunan Kebijakan Umum diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan daerah dengan potensi sumber daya yang ada, sehingga akan terwujud pembangunan yang efisien, efektif dan berhasil guna.

Kebijakan umum disusun sebagai bagian dari strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, layanan publik dan daya saing sebagaimana amanat otonomi daerah, serta meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan serta mewujudkan supremasi hukum dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan serta tindakan-tindakan tertentu yang mengandung persepsi dan tekanan khusus yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Perumusan kebijakan tidak lepas dari penilaian keterkaitan antara visi, misi dan isu-isu strategis yang telah ditentukan.

Arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Jemberana untuk jangka menengah merupakan acuan bagi SKPD merumuskan program SKPD dan program lintas SKPD guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan mencermati gambaran umum daerah, maka Pemerintah Kabupaten Jemberana perlu menetapkan arah kebijakan umum dan program pembangunan.

Adapun arah kebijakan umum Kabupaten Jemberana 2011-2016 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
 - a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, yang meliputi pelayanan kesehatan yang lebih baik melalui kepesertaan Kabupaten Jemberana terhadap program JKBM (Jaminan Kesehatan Bali Mandara), dengan skema pelayanan kesehatan yang lebih luas dan berkualitas, serta berlaku di seluruh rumah Sakit Pemerintah yang ada di Provinsi Bali.



-
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, lewat program bebas SPP dan biaya pendidikan, serta pemberian beasiswa secara adil dan merata bagi setiap warga masyarakat Jemberana yang berprestasi dan tidak mampu, sehingga tercipta pendidikan yang merata, terjangkau dan lebih berkualitas.
2. Peningkatan daya saing ekonomi
 - a. Membuka peluang berusaha yang seluas-luasnya kepada setiap warga masyarakat Jemberana, lewat program UMKM, Koperasi dan usaha-usaha non formal lainnya, dengan memberikan bantuan modal tanpa anggungan dan tanpa bunga, serta menjamin ketersediaan pasar, baik pasar lokal, domestik maupun internasional.
 - b. Membuka peluang dan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Jemberana, lewat program padat karya, pola pemagangan serta pengiriman tenaga kerja terampil ke luar negeri secara legal dan bertanggung jawab, lewat kerjasama antar negara/daerah dengan payung hukum yang jelas dan saling menguntungkan di bawah pengawasan Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja RI.
 - c. Optimalisasi sumberdaya pertanian, perikanan dan peternakan, lewat program pertanian terpadu, dengan pelaku utama para petani, nelayan dan peternak tradisional, sehingga terbangun sinergi positif antara petani dengan pengusaha dan pasar serta lembaga perbankan sebagai penyedia modal.
 3. Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari
 - a. Pengembangan infrastruktur, diantaranya pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi seiring dengan penataan kota melalui pembangunan trotoar, ruang publik dan infrastruktur niaga dan jasa.
 - b. Pemeliharaan lingkungan lestari, yaitu pembangunan ruang terbuka hijau, pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
 4. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi
 - a. Membebaskan PNS termasuk para guru dan perilaku politik praktis dan mengembalikan kesejatan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten



Jembrana kepada fungsi kepomong-prajaan, dengan memberikan peluang yang seluas-luasnya untuk berkarya dan mengembangkan karier sesuai peraturan perundang-undangan yang ada secara bertanggung jawab, berkeadilan dan terbebas dari rasa takut/ tekanan, serta menjamin nyaman kerja para Guru pendidik di dalam melahirkan generasi-generasi yang cerdas, unggul di Kabupaten Jembrana.

- b. Mengajak seluruh komponen dan potensi masyarakat di Kabupaten Jembrana termasuk kaum perempuan, pemuda, mahasiswa dan pelajar, untuk bersama-sama melakukan perbaikan di segala bidang, sehingga terbangun “kemandirian” bagi setiap warga masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan secara bertanggung jawab dan berhasil guna, baik bagi diri sendiri, keluarga, nusa dan bangsa, berdasarkan nilai-nilai adat, budaya dan kemulyaan agama, yang didukung oleh infrastruktur yang berkualitas serta pemerintahan yang terbebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

5. Pembangunan Politik, Hukum dan HAM

- a. Pembangunan politik dan kesadaran berdemokrasi, diantaranya pembinaan partai politik, dan peningkatan kesadaran masyarakat serta membangun iklim demokrasi yang sehat.
- b. Penegakan Hukum dan HAM, diantaranya pemberdayaan masyarakat dalam pemahaman Hukum dan HAM, penegakan peraturan, pencegahan dan penindakan KKN.
- c. Pemantapan legislasi daerah, diantaranya pengembangan dan penyempurnaan materi peraturan daerah, sosialisasi dan peningkatan koordinasi serta kerjasama dengan lembaga legislatif.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

Sesuai dengan tema pembangunan tahun 2011, ekonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang direncanakan sebesar 4,90 %, dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur serta dengan terjaganya stabilitas ekonomi.



Untuk dapat tercapainya laju pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2011 sebesar 4,90 %, maka target PDRB Kabupaten Jemberana atas dasar harga berlaku direncanakan sebesar Rp.3.732.763,96 (juta). Disamping itu, seluruh sektor ekonomi harus didorong terutama dengan meningkatkan investasi, ekspor, perdagangan dan mendorong peningkatan sektor industri pengolahan, revitalisasi pertanian dan menggerakkan UMKM.

Peningkatan investasi dan ekspor didorong dengan meningkatkan daya tarik investasi dengan memberikan berbagai kemudahan, mengurangi hambatan prosedur perijinan, meningkatkan kepastian hukum termasuk terhadap peraturan-peraturan daerah yang dirasakan menghambat serta diversifikasi pasar ekspor, mendorong komoditi non migas yang bernilai tambah tinggi. Daya saing industri pengolahan non migas ditingkatkan antara lain dengan pengembangan fasilitas industri hilir komoditi primer dan penggunaan produksi dalam negeri.

Investasi juga akan didorong dengan meningkatkan produktivitas dan akses UMKM pada sumber daya produktivitas. Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga diberikan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur. Untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, maka tingkat inflasi diupayakan dapat dikendalikan sehingga tidak mencapai angka diatas 6,00 persen.

Struktur perekonomian Kabupaten Jemberana masih didominasi oleh peran sektor tersier, dimana pada tahun 2011 diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Jemberana sebesar 57,48 %, yang meliputi sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan dan jasa-jasa. Disamping itu sektor primer diharapkan dapat memberikan kontribusi sebesar 26,38 %, dimana sumbangan dari sektor pertanian masih memberikan sumbangan yang terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya, sedangkan sektor sekunder yang terdiri dari sektor industri, listrik, gas dan air bersih serta bangunan diharapkan dapat memberikan kontribusi sebesar 16,14 %.



Kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan terus didorong. Perbaikan iklim ketenagakerjaan akan ditingkatkan dengan memberikan perhatian pada penempatan, perlindungan dan pembiayaan tenaga kerja keluar negeri. Pembangunan pertanian dan pembangunan perdesaan didorong melalui peningkatan produksi pangan, produktifitas pertanian secara luas, diversifikasi ekonomi pedesaan. Upaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin juga akan didorong oleh berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang pro rakyat miskin, memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, serta meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Menyadari akan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil, maka Pemerintah Kabupaten Jember telah mengoptimalkan penerapan pola intensifikasi maupun ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan. Demikian pula terhadap sumber-sumber pendapatan yang bersumber dari pemerintah atasan maupun pusat telah dimanfaatkan sebagai motorisator pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang, stabilitas perekonomian adalah merupakan salah satu prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan, serta dapat memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi, oleh karenanya stabilitas ekonomi makro akan dapat dicapai apabila hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi Perekonomian yang tidak stabil akan dapat menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga.

Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan adanya fluktuasi yang tinggi dalam pertumbuhan



produksi, hal ini sangat berpengaruh terhadap tenaga kerja menganggur. Inflasi yang tinggi akan merupakan beban yang sangat berat dan sangat dirasakan oleh penduduk miskin, dimana daya beli masyarakat akan semakin rendah.

Mengingat pentingnya stabilitas ekonomi makro bagi kelancaran dan pencapaian sasaran Pembangunan Daerah, maka untuk menjaga stabilitas perekonomian dan mencegah timbulnya fluktuasi yang berlebihan, maka pemerintah berupaya untuk terus menciptakan dan memantapkan stabilitas ekonomi makro.

Kebijakan keuangan diarahkan pada :

- a. Menyeimbangkan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan anggaran melalui peningkatan penerimaan daerah untuk dapat menaikkan belanja daerah, dengan harapan penurunan defisit anggaran secara bertahap.
- b. Peningkatan penerimaan daerah terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan sumber-sumber penerimaan daerah yang sah lainnya.
- c. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah ditempuh melalui mempertajam pengalokasian anggaran agar lebih terarah dan tepat sasaran.

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), ditempuh melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi, dimana Intensifikasi diarahkan pada peningkatan penyuluhan, pendataan potensi, perubahan tarif, peningkatan SDM, perbaikan system, koordinasi dan pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan. Sedangkan kegiatan Ekstensifikasi diarahkan pada inovasi terhadap sumber-sumber PAD baru atau diversifikasi sumber-sumber penerimaan lainnya.

Sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a UU No. 25 Tahun 1999 merupakan sumber keuangan yang digali dari dalam wilayah yang bersangkutan yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah,



Bagian Laba Usaha milik Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sedangkan pendapatan daerah yang diperoleh dari Dana Perimbangan terdiri dari :

- Bagi hasil Pajak dan Bukan Pajak
- Dana Alokasi Umum (DAU)
- Dana Alokasi Khusus (DAK)
- Bagi hasil Pajak dan Bantuan Keuangan pemerintah Propinsi/Kabupaten/ Kota.

Sasaran strategi dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah optimalisasi pendapatan daerah baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Perimbangan sebagai cerminan indikator kinerja pengelolaan pendapatan daerah.

Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Dalam upaya memperlancar penerimaan pembiayaan daerah ditempuh dengan meningkatkan pembinaan, monitoring dan intensifikasi terhadap sasaran-sasaran kelompok yang mengelola kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, serta melaksanakan ekstensifikasi terhadap potensi yang belum dikembangkan.

Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dana adalah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses manajemen pemerintahan, oleh karena itu terhadap kegiatan-kegiatan yang diprogramkan mendapat perhatian yang serius namun “bukan pada berapa jumlah atau berapa persen dana yang dialokasikan, tapi bagaimana pemanfaatan dana tersebut”. Oleh karenanya langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk menjamin kualitas dan kuantitas barang maka dibuat standar satuan harga barang, dan menggunakan Standar Satuan Harga Dinamis yang diadakan perubahan setiap triwulan sesuai dengan perkembangan harga pasar.

Terhadap pelaksanaan proyek/kegiatan Pemerintah Kabupaten Jember menerapkan pola OE (Owner Estimate), dimana anggaran yang tertuang pada APBD tidak menjadi standar mutlak, melainkan mengacu juga pada OE yang dibuat oleh Konsultan Independen. Dengan menerapkan pola OE pada kegiatan fisik, maka efisiensi dan pengawasan mutu proyek dapat dilaksanakan secara optimal.



Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan untuk mempertahankan harga hasil bumi pada saat panen raya khususnya pertanian, maka upaya yang ditempuh pemerintah daerah adalah dengan memberikan dana talangan kepada para petani dan mengembangkan program dana bergulir kepada kelompok-kelompok usaha yang ada dimasyarakat.

C. PRIORITAS DAERAH

Program prioritas diartikan sebagai penjabaran pelaksanaan Visi dan Misi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bupati Jembrana 5 (lima) tahun kedepan. Penetapan program prioritas mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan penyelesaian permasalahan lainnya.

Secara umum untuk tahun 2011-2016 prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 dengan mempertimbangkan substansi program-program yang sudah berjalan pada periode sebelumnya, maka disusun 5 (lima) program prioritas untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana melalui peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan kualitas di bidang pendidikan.
2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kabupaten Jembrana melalui pembelian ruang yang lebih luas dalam berusaha lewat program UMKM, koperasi dan usaha non formal lainnya, membuka dan mendidik tenaga terampil untuk mengisi lapangan kerja dan optimalisasi sumber daya alam yang dimiliki untuk menambah nilai ekonomis.
3. Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur serta pelestarian lingkungan yang berwawasan Tri Hita Karana.
4. Mewujudkan Pemeritahan yang baik dan bebas korupsi melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur secara profesional serta mengajak segenap



komponen masyarakat dalam melaksanakan kontrol terhadap penyelenggara pemerintahan.

5. Pembangunan Politik, Hukum dan HAM melalui pemberdayaan masyarakat terhadap pemahaman Hukum dan HAM, penegakan peraturan perundangan serta pencegahan dan penindakan KKN.

Periode dalam penyusunan program pembangunan Tahun 2011 - 2016 yang tertuang dalam dokumen RPJMD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

Sedangkan dalam alokasi dan kebijakan penganggaran yang terkait dengan penyelenggaraan urusan tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.